

NASKAH PUBLIKASI

**POLITISASI ISU PRIBUMI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA
2017 DI MEDIA SOSIAL : ANALISIS ANTARA AHOK DAN ANIES**

Oleh:

Tri Oka Putra Laksana
20150520124

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah penulisan
karya ilmiah

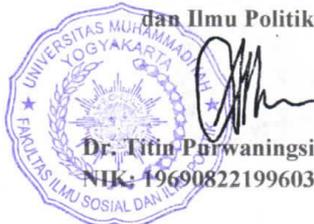


Dosen Pembimbing

Dr. phil. Ridho Alhamdi, M.A.
NIK: 19850510201204163131

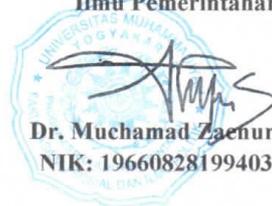
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603163038

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403163025

POLITISASI ISU PRIBUMI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017 DI MEDIA SOSIAL : ANALISIS ANTARA AHOK DAN ANIES

Tri Oka Putra Laksana

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : tri.oka.2015@fisipol.umy.ac.id / okalaksana79@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan menjadikan adanya konflik pribumi versus non-pribumi. Pada pemilihan Gubernur yang berlangsung di DKI Jakarta Tahun tahun 2017 antara kubu Ahok dan Anies menggunakan akun media sosial facebook untuk memposting berupa ide dan gagasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui politisasi isu pribumi yang terdapat di postingan media sosial facebook antara kubu Ahok dan Anies.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa kualitatif yang bersifat kepustakaan. Data primer dari penelitian ini bersumber dari berita online, media bereputasi, kredibel dan akun media sosial *facebook* antara kubu Ahok dan Anies. Data sekunder yang diperlukan dengan mengandalkan dokumen berupa jurnal-jurnal, dan buku yang sesuai dengan penelitian. Untuk teknik analisa dapat dilakukan dengan cara reduksi data, pembahasan dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politisasi isu pribumi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 di media sosial facebook diukur dengan tiga indikator yaitu isu dan kepentingan, agenda politik, partisipasi. pada kubu Ahok menggunakan tiga isu yaitu, Pilkada damai, Jakarta Punya Semua (Keberagaman), dan Keadilan untuk Ahok. Kedua, pada kubu Anies menggunakan dua isu yaitu pemimpin muslim santun dan reklamasi pantai sehingga dengan isu yang disebarkan melalui akun media sosial *facebook* antara kubu Ahok dan Anies dapat mempengaruhi persepsi masyarakat pengguna media sosial pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kedua, agenda politik yaitu berita online dalam memberitakan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kampanye di media sosial *facebook* oleh kubu Ahok dan Anies untuk meyakinkan masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memilih antara Ahok dan Anies pada Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017 melalui postingan konten yang menarik di media sosial *facebook*. Ketiga partisipasi yang dilakukan masyarakat dengan memberikan respon pada postingan akun media sosial *facebook* antara kubu Ahok dan Anies yaitu berupa like, share dan komentar. Kesimpulan jadi indikator dominan terjadinya politisasi isu pribumi pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 di media sosial *facebook* antara kubu Ahok dan Anies adalah isu dan kepentingan.

Kata Kunci : Politisasi Isu Pribumi, Pilgub DKI Jakarta 2017, Media Sosial dan Facebook.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan (SARA) yang menjadikan kekayaan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia. Tetapi, dengan itu ada dampak negatif yang dapat menjadikan konflik antar budaya. Penyebab terjadinya konflik di Indonesia, seperti keberadaan non-pribumi versus pribumi, konflik agama, khususnya agama Islam dan agama Kristen. Terjadinya konflik atas dasar isu-isu karena kesenjangan ekonomi politik yang terjadi seperti kekayaan non-pribumi atas pribumi, kekayaan minoritas Kristen atas mayoritas umat Islam, dan dominasi suku Jawa atas non Jawa dalam pentas politik. Terdapat banyak konflik permasalahan dalam hubungan etnik di Indonesia yang berujung kepada konflik, seperti isu pribumi (Indonesia asli) dengan non-pribumi (China keturunan), dan isu agama (Tajuddin & Sani, 2016).

Istilah dari pribumi muncul pada masa kolonial Hindia Belanda dalam undang-undang Belanda tahun 1854 oleh pemerintahan Kolonial Belanda yaitu beragam kelompok penduduk asli di Nusantara sebagai bentuk diskriminasi sosial. Pada masa kolonial Belanda adanya segregasi (pemisahan) rasial dalam tiga tingkat : ras kelas pertama adalah *Europeanen* (Eropa kulit putih), ras kelas kedua adalah *Vreemde Oosterlingen* (Timur asing) yang terdiri dari orang Tionghoa, Arab, India maupun non-eropa dan ras yang ketiga adalah *Inlander*, yang diterjemahkan yaitu “Pribumi” (Kompas.com, 2017).

Melihat kondisi DKI Jakarta yang merupakan daerah majemuk, perpecahan dapat dengan mudah terjadi pada daerah yang majemuk yaitu sangat rentan terjadi karena banyaknya perbedaan yang ada dan belum tentu setiap suku maupun etnis yang ada di Jakarta bisa paham dan saling mengerti dengan etnis lainnya. Pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 isu agama, isu etnis juga turut mewarnai

berjalannya proses tersebut, yang menyerang salah satu kandidat yaitu Ahok yang menjadi objeknya, yang menganut agama Kristen dan keturunan etnis China. Etnis China merupakan golongan minoritas di Jakarta secara golongan Ahok berasal dari golongan minoritas karena beragama Kristen dan keturunan etnis China. Menjadikan adanya gejala politik identitas di pilkada tersebut, Maka adanya perbedaan antara etnik China dan pribumi menjadikan etnik China sulit untuk di terima sebagai bagian dari Indonesia (Sipahutar, 2018).

Politisasi Isu pribumi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 di gunakan untuk menjaring suara dimana isu yang digunakan untuk memilih kepala daerah yang berasal dari daerah asal atau pribumi. Adanya rasisme yang dilakukan terhadap kelompok etnis tertentu yang pada dasarnya karena alasan politik. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat secara umum untuk membenci terhadap kelompok etnis tertentu, apalagi pada era saat ini penyebaran kebencian bisa berkembang lebih luas melalui media sosial. Dengan adanya media sosial menjadikan segala bentuk informasi yang luas dan beragam dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu peristiwa. Apalagi informasi yang disajikan tersebut dilakukan secara terus-menerus, secara tidak langsung pikiran masyarakat akan terpengaruhi dan menjadikannya opini masyarakat (Geotimes.com, 2017).

Pengaruh media sosial memiliki peran penting untuk mengubah penilaian orang tentang suatu hal sehingga lebih efektif untuk menjaring pemilih (Tempo.com, 2017). Pada pilkada DKI Jakarta 2017 dengan para paslon memiliki akun media sosial menimbulkan efek positif dan juga efek negatif dari media sosial itu sendiri yaitu dengan adanya praktik *hatespeech* atau ujaran kebencian (SARA) yang disebarakan yaitu melalui media sosial , berita dan informasi mengenai ketiga paslon Cagub dan Cawagub DKI Jakarta yang banyak diperbincangkan di media online oleh para

pendukung maupun *haters* (pembenci) masing-masing. Pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 sarat dengan ujaran kebencian yang dikembangkan masing-masing pendukung terhadap rival mereka (Juditha, 2017). Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Penulis akan membahas tentang “Politisasi Isu Pribumi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 di Media Sosial : Analisis Antara Kubu Ahok dan Anies”.

B. KERANGKA TEORITIK

1. Pilkada

Nopyandri (2008) Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri merupakan dari, oleh, dan untuk rakyat serta diharapkan dalam proses penyelenggaraanya dilakukan jujur, adil, dan aman. Sistem yang pemilihan secara langsung yang dilaksanakan pada pemilihan kepala daerah diharapkan pemimpin yang membawa perubahan baik dalam suatu kabupaten/kota yang dipimpinnya. Baik secara moral adanya ikatan dan tanggungjawab kepada konstitusi serta pemilihnya yaitu masyarakat yang dipimpinnya. Pada proses Pilkada yang dilakukan secara langsung telah dilakukan sejak tahun 2005, yang berdasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara langsung.

Menurut Budiarjo (2008:461) dari perspektif politik dan pemerintahan, penyelenggaraan Pilkada memang memberi ruang bernafas yang lebih longgar bagi partisipasi otonomi masyarakat. Pilkada langsung yang semestinya memiliki makna mendalam dan amat berarti dapat menjadi ajang penguatan *civil society* karena

menentukan kepala daerah tidak lagi menjadi urusan dominan aktor tunggal yang dalam hal ini adalah politik dan lembaga legislatif.

2. Politik Identitas

Tournquist (2005 hal: 125) menjelaskan bagaimana cara aktor menetapkan isu dan kepentingan dalam istilah-istilah politik dan bagaimana mencoba menggalang dukungan politik supaya bisa terus-menerus mengikuti langkah mereka, dengan menggunakan politisasi yang terdiri dari tiga dimensi :

1. Isu dan Kepentingan

Isu merupakan sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Isu muncul disebabkan adanya ketidaksesuaian pengharapan publik. Isu bisa meliputi masalah, berita atau kabar, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan. Oleh karena itu isu dalam politik biasanya digunakan untuk kepentingan tertentu yang bersangkutan-paut dengan aktor politik, organisasi, gerakan tertentu, dan kelompok penekan.

2. Agenda Politik

Serangkaian isu-isu yang diberitakan, digambarkan dan menjadikan pemberitaan mempunyai nilai lebih terhadap persoalan yang muncul sehingga menjadi informasi bagi publik. Agenda politik biasanya dalam bentuk opini dalam berita-berita propaganda dan kampanye sehingga dapat mempengaruhi publik dengan seperti itu menghasilkan keuntungan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

3. Partisipasi

Keikutsertaan dan emosi seseorang dalam memberikan respon terhadap suatu proses serta mendukung pencapaian tujuan dan

bertanggung jawab atas keterlibatannya. Partisipasi politik sering kali dihubungkan dengan proses politik yang demokratis, yang melibatkan interaksi perseorangan dan organisasi. Partisipasi politik dihubungkan dengan demokrasi politik yang mengedepankan prinsip perwakilan dan partisipasi tidak langsung.

Buchari (dalam Sipahutar 2018), politik Identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai tujuan tertentu, kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan yaitu berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa politik identitas merupakan alat perjuangan yang digunakan suatu kelompok untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kelompok tersebut.

Mengenai proses terjadinya pembentukan dari Politik Identitas itu sendiri Menurut Sari (2016) ada tiga pendekatan pembentukan identitas yaitu:

1. Primordialisme : identitas diperoleh secara turun-temurun seperti pada agama maupun etnis dengan pendekatan ini dijadikan sumber utama kepada seseorang apakah orang tersebut memiliki agama yang sama atau etnis yang sama dengan dirinya.
2. Konstruktivisme : identitas sebagai suatu yang dibentuk pada proses sosial yang kompleks. Identitas dibentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat, dalam pembentukan identitas lahir dari penggalian dan penanaman nilai sosial seperti pada Bhineka Tunggal Ika yang merupakan identitas kolektif bangsa dengan upaya untuk mempersatukan golongan yang ada di Indonesia baik agama maupun etnis.

3. Instrumentalisme : identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan pembentukan identitas, biasanya identitas ini digunakan untuk pemilu untuk memposisikan calon sebagai sama dengan masyarakat.

3. Media Sosial

Boyd menjelaskan media sosial yaitu sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi dan bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user generated content* (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media sosial.

Van Dijk (2013), mengemukakan media sosial adalah platform media yang mengemukakan bahwa media sosial yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Maka itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

C. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional yaitu bagian fundamental dalam suatu penelitian, karena pada bagian ini akan memberikan petunjuk dalam mengukur suatu variable dalam melakukan penelitian. Disini akan ditentukan indikator variabel dan bagaimana mengukur indikator tersebut. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 1
Operasional Konsep

Variabel	Indikator	Parameter
Politisasi Isu Pribumi	Isu dan Kepentingan	Analisis frekuensi isu dan kepentingan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 di media sosial melalui Facebook
	Agenda Politik	<ul style="list-style-type: none">- Cara memberitakan isu melalui opini berita- Cara memberitakan melalui kampanye di media sosial
	Partisipasi	Frekuensi respon masyarakat terhadap isu pada akun media sosial Cagub-Cawagub melalui Facebook

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Menurut Nazir (2003: 27), menyatakan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kajian terhadap buku-buku, literature, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah penting dimana setelah menentukan topik penelitian, langkah selanjutnya yaitu pencairan teori dengan mengumpulkan informasi-informasi serta data yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu melakukan kajian dan analisis mengenai teori yang sudah ditemukan.

2. Sumber Data

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang sumber datanya berasal dari data-data kepustakaan. Data tersebut dikumpulkan dengan cara mencari, memilih, menyajikan dan menganalisis data-data literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini adalah berita online dari media bereputasi dan kredibel juga pada pada laman Grup *Facebook* pasangan Cagub dan Cawagub DKI Jakarta. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini yaitu data dari jurnal - jurnal, buku – buku ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

E. PEMBAHASAN

1. Isu Dan Kepentingan

Pada Pilkada yang diselenggarakan di DKI Jakarta Tahun 2017 para Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur menjadikan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan isu dan kepentingan yang berguna untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 yaitu berupa konsep dan gagasan. Isu yang digunakan pada Pilkada DKI Jakarta yaitu untuk mempengaruhi masyarakat dalam hak pilihnya untuk menentukan pilihan dengan memanfaatkan akun media sosial para pasangan calon bebas membuat dan menyebarkan isu berupa konten yang mereka posting di akun media sosial yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat pengguna media sosial sehingga dengan itu dapat memenangkan Pilkada yang berlangsung di DKI Jakarta pada tahun 2017.

Penggunaan laman komunitas *facebook* oleh kubu Ahok dan Anies terkait Pilkada DKI Jakarta untuk mendukung kampanye dan mempengaruhi opini publik di media sosial *facebook*, sehingga profil harus seterbuka mungkin sehingga masyarakat pengguna *facebook* dapat melihat postingan yang berupa teks, foto dan video. Pada postingan pada laman komunitas *facebook* antara kubu Ahok dan Anies untuk mengetahui frekuensi isu apa saja yang digunakan pada media sosial *facebook* sebagai berikut :

Tabel 2 Frekuensi

Nama	ISU	Tanggal/Bulan/Tahun	Frekuensi
Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saifull Hidayat	Pilkada Damai	10 Februari 2017	2
		11 Februari 2017	6
	Jakarta punya semua (keberagaman)	20 Maret 2017	1
		27 Maret 2017	1
		28 Maret 2017	1

		2 April 2017	1
		5 April 2017	1
		8 April 2017	2
		12 April 2017	1
		15 April 2017	3
	Keadilan untuk Ahok	10 Mei 2017	5
		11 Mei 2017	2
		20 Mei 2017	13
Jumlah	3	13	39
Anies baswedan - Sandiaga Uno	Pemimpin Muslim Santun	14 November 2016	1
		17 November 2016	1
		19 November 2016	1
		5 Desember 2016	1
		12 Desember 2016	1
		15 Desember 2016	1
		16 Desember 2016	1
		6 Januari 2017	1
		8 Januari 2017	1
		10 Januari 2017	1
		23 Januari 2017	1
		27 Januari 2017	1
		10 Februari 2017	1
		16 Februari 2017	1
12 April 2017	1		
	Reklamasi Pantai	24 Januari 2017	3
Jumlah	2	16	18

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2019)

Berdasarkan dari analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai frekuensi isu di akun media sosial *facebook* antara kubu Ahok dan Anies. Pertama pada media sosial *facebook* kubu Ahok yaitu terdapat tiga isu yang digunakan yaitu mengenai Pilkada damai, Jakarta punya semua (keberagaman) dan keadilan untuk Ahok. Kedua kubu Anies yaitu terdapat dua isu yang digunakan yaitu mengenai pemimpin muslim santun dan reklamasi pantai untuk tanggal postingan yang diunggah di akun *facebook*.

2. Agenda Politik

Agenda politik merupakan dari serangkaian isu-isu yang diberitakan, digambarkan sehingga menjadikan pemberitaan mempunyai nilai lebih terhadap pada suatu persoalan yang muncul sehingga menjadikannya sebagai informasi bagi publik. Agenda politik biasanya berupa opini dalam berita-berita propaganda dan kampanye digunakan untuk dapat mempengaruhi publik sehingga mendapatkan keuntungan kepada suatu golongan atau kelompok tertentu. Pada agenda politik yang dilakukan saat berlangsungnya Pilkada di DKI Jakarta 2017 oleh para pasangan calon terdapat dua cara yang dilakukan antara kubu Ahok dan Anies sebagai berikut :

a) Memberitakan Isu Melalui Opini Berita

Media massa saat ini berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, edukasi, hiburan dan mobilisasi. Media massa juga bisa digunakan untuk menyampaikan pesan, ide-ide, dan gagasan. Seperti gagasan keberagaman, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan (SARA). Kebebasan media massa untuk memberitakan melalui opini berita yaitu ketika dimulainya era reformasi termasuk media online (Media Daring) adanya kebebasan pers untuk kebebasan mengekspresikan gagasan dan mengkritik tajam lawan yang menentang gagasan (Junaidi, 2017). Pada Pilkada yang berlangsung di

DKI Jakarta 2017 penggunaan istilah yang bernuansa isu pribumi, penulis melakukan penelitian terhadap berita-berita yang dimuat pada media online. Ketiga media itu adalah Detik.com, Merdeka.com, Kompas.com

b) Cara Memberitakan Melalui Kampanye di Media Sosial

Kampanye yang dilakukan di akun media sosial seperti pada *Facebook* yang digunakan oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 yaitu Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saifull Hidayat dan Anies Baswedan -Sandiaga Uno. Pada putaran kedua KPU Jakarta mewajibkan untuk kedua kubu antara Ahok dan Anies untuk kampanye melalui media sosial dirasa lebih efektif ketimbang baliho dan spanduk. Maka dengan itu, tim sukses kubu Ahok dan Anies berkampanye dengan memberitakan segala bentuk informasi yang mereka sebarkan di akun media sosial *facebook* masing-masing untuk mendukung kampanye sebagai sarana adu ide dan gagasan dengan membuat konten yang menarik sehingga dapat mempengaruhi masyarakat pengguna media sosial yaitu melalui *facebook* kubu Ahok dan Anies.

3. Partisipasi

Pada postingan akun *facebook* antara kubu Ahok dan Anies terkait dengan penggunaan isu yang kedua kubu posting di akun *facebook* yaitu untuk mempengaruhi pandangan masyarakat yang membaca sehingga mempengaruhi pilihannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Maka dari itu, adanya suatu tanggapan dan interaksi dari masyarakat di *facebook* seperti menyukai postingan, membagikan postingan dan mendapatkan komentar dari masyarakat yaitu dengan mendukung dan menolak postingan dari kedua kubu Ahok dan Anies. Sehingga adanya komentar positif maupun negatif terkait pada postingan antara kubu Ahok dan Anies. Maka dari itu,

penulis menganalisis frekuensi respon masyarakat pada *facebook* antara kubu Ahok dan Anies sebagai berikut :

Tabel 3 Respon Masyarakat di Facebook

Nama	Isu	Jumlah Postingan	Like	Komentar	Share
Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saifull Hidayat	Pilkada Damai	8	30.500	1.641	1.758
	Jakarta Punya Semua (Keberagaman)	11	60.629	2.569	10.700
	Keadilan Untuk Ahok	20	184.700	22.698	16.240
Frekuensi	3	39	275.829	26.908	28.698
Anies Baswedan-Sandiaga Uno	Pemimpin Muslim Santun	14	59	2	17
	Reklamasi Pantai	3	3	0	1
Frekuensi	2	17	62	2	18

Sumber : <https://m.facebook.com/AhokDjarot/> Dan <https://m.facebook.com/suaraanies/>

F. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa politisasi isu pribumi pada pilgub DKI Jakarta 2017 di media sosial digunakan sebagai alat untuk kepentingan yang berupa konten yang diposting oleh kubu Ahok dan Anies melalui *facebook* yaitu untuk mempengaruhi pembacanya dengan isu-isu yang disebar di akun media sosial pasangan calon sehingga dapat mempengaruhi masyarakat pengguna media sosial dengan menggunakan isu - isu yang dapat mempengaruhi pandangan dan pilihan masyarakat pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Isu dan kepentingan yang digunakan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 oleh kedua kubu antara Ahok dan Anies di akun media sosial yang diposting melalui *facebook* yaitu bertujuan untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta 2017 sehingga dengan isu yang disebar melalui akun media sosial *facebook* dapat mempengaruhi masyarakat yang mengikuti di akun media sosial *facebook* Cagub - Cawagub yang membacanya. Pertama, pada kubu Ahok - Djarot di akun media sosial *facebook* menggunakan tiga isu yaitu mengenai Pilkada damai, Jakarta punya semua (keberagaman), dan keadilan untuk Ahok yang diposting dari bulan Februari 2017 - Mei 2017 untuk frekuensi jumlah postingan keseluruhan sebanyak 39 kali. Kedua, pada kubu Anies - Sandi di akun media sosial *facebook* menggunakan dua isu yaitu mengenai pemimpin muslim santun dan reklamasi pantai yang diposting dari bulan November 2016 - Januari 2017 untuk frekuensi jumlah postingan keseluruhan sebanyak 18 kali.
2. Agenda politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yaitu berupa opini dalam berita online yang memberitakan isu mengenai SARA pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017

yang bisa merubah pandangan masyarakat bagi pembacanya pada berita online saat Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung ditemukan banyak berita online positif dengan tidak mendukung adanya penggunaan isu SARA pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. Agenda politik pada kegiatan kampanye di akun media sosial melalui *facebook*. dengan menggunakan konten yang menarik sehingga masyarakat dapat terpengaruhi untuk memilih antara Ahok dan Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

3. Respon yang dilakukan oleh masyarakat dengan memberikan tanggapan pada postingan akun media sosial *Facebook* antara kubu Ahok dan Anies. Pertama respon yang diberikan masyarakat diposting *facebook* kubu Ahok - Djarot terhadap tiga isu yang terdiri dari Pilkada damai, Jakarta punya semua (keberagaman) dan keadilan untuk Ahok untuk frekuensi jumlah postingan seluruhnya sebanyak 39 kali, jumlah seluruhnya masyarakat yang menyukai postingan sebanyak 275.829, jumlah seluruhnya masyarakat yang memberikan komentar sebanyak 26.908, jumlah seluruhnya masyarakat yang membagikan postingan sebanyak 28.698 kali. Pada *facebook* kubu Ahok - Djarot respon yang didapat dari pendukung maupun masyarakat pengguna media sosial *facebook* dengan lebih banyak memberikan dukungan melalui komentar positif dibandingkan dengan yang memberikan komentar negatif diposting kubu Ahok - Djarot. Kedua respon yang diberikan masyarakat diposting *facebook* kubu Anies - Sandi terhadap dua isu yang terdiri dari pemimpin muslim santun dan reklamasi pantai untuk frekuensi jumlah postingan seluruhnya sebanyak 14 kali, jumlah seluruhnya masyarakat yang menyukai postingan sebanyak 62, jumlah seluruhnya masyarakat yang memberikan komentar sebanyak 2, jumlah seluruhnya masyarakat yang membagikan postingan sebanyak 18 kali.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar – dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Facebook Ahok - Djarot : <https://m.facebook.com/AhokDjarot/>
- Facebook Anies - Sandi : <https://m.facebook.com/suaraanies/>
- Geotimes.co.id (2017). *Politisasi isu pribumi-non pribumi*. Diambil dari <https://geotimes.co.id/opini/politisasi-isu-pribumi-non-pribumi/>
- Junaidi, A. (2017). Media dan keberagaman : Analisis pemberitaan media daring seputar Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1 (1) , 329–337.
- Kompas.com (2017). *Pribumi dan politik populisme*. Diambil dari : <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/17/10321011/pribumi-dan-politik-populisme#page1>
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Nopyandri. (2008). Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dalam perspektif UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2), 1–14.
- Sari, E. (2016). Kebangkitan politik identitas Islam pada arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(2), 145-156.
- Sipahutar, M. Z. (2018). Politik pribumi dan non pribumi (analisis wacana kritis identitas KeIndonesiaan dalam pidato Anies Baswedan). Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara
- Tajuddin, M.S & Sani, M. (2016). Berbagai kasus konflik di Indonesia: Dari isu non pribumi, isu agama, hingga isu kesukuan. *Jurnal Sulesana*, 10, 63–72.
- Tempo.com (2017). *Pilkada DKI, Anies-Sandi fokus kampanye di media sosial*. Diambil dari

:<https://pilkada.tempco.co/read/857241/pilkada-dki-anies-sandi-fokus-kampanye-di-media-sosial>

Tornquist, Olle, John Harris, dan Kristian Stokke. (2005). *Politisasi demokrasi: politik lokal baru*. Jakarta: Demos